

ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KOTA MEDAN

Astari Khairunnisa
Paidi Hidayat, SE, M.Si

ABSTRACT

This research aimed to determine the pattern of economic development of each district, the level of disparity (inequality) economic development that occurs among districts, and the appropriate strategies and policies in problem solving disparity (inequality) economic development in Medan. This research uses Typologi Klassen analysis, Williamson Index analysis, and descriptive analysis.

The results of Typologi Klassen analysis during the periode 2001-2005 and 2006-2010 classify 3 districts included in quadrant I (fast forward and fast growing) , 5 districts included in quadrant II (forward but depressed), 2 districts included in quadrant III (fast growing), 4 districts included in quadrant IV (relatively underdeveloped) and 7 districts have been changed the pattern of economic development. Analysis Williamson Index shows that the value are low with an average index is 0.16994. So the strategies and policies an needed in the problem solving of disparity or inequality that occurred in Medan.

Keywords : *Economic Development Disparity, Klassen Typologi, Williamson Index*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan khususnya bidang ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata keseluruhan daerah, maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Secara bertahap diusahakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan (Sirojuzilam, 2008).

Secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP perkapita (Gross National Product) atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu: suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang terjadi dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditujukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah atau regional (Sirojuzilam, 2008). Sejak adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan perekonomian daerah. Daerah-daerah semakin memiliki kebebasan untuk mengembangkan

wilayahnya sesuai kebutuhan masyarakat lokal (Nehen, 2010). Namun tidak semua daerah mengalami proses pembangunan ekonomi yang berjalan sama. Beberapa daerah mencapai pembangunan yang cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pembangunan yang lambat. Hal ini menimbulkan ketimpangan atau disparitas pembangunan ekonomi antara suatu daerah dengan daerah yang lain.

Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan, dimana pembangunan ekonomi Kota Medan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi kecamatan-kecamatanannya. Pembangunan tiap-tiap kecamatan tentu tidaklah sama. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki tiap kecamatan berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi tiap kecamatan di Kota Medan terhadap PDRB Kota Medan pada tabel 1.

Tabel 1
Distribusi PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kecamatan Tahun 2006-2010 (Persen)

	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	M. Tuntungan	1,08	1,06	1,06	1,08	1,08
2.	M. Johor	1,48	1,48	1,47	1,49	1,50
3.	M. Amplas	2,71	2,71	2,62	2,71	2,73
4.	M. Denai	1,32	1,29	1,25	1,28	1,30
5.	M. Area	2,03	2,08	2,03	2,04	2,05
6.	M. Kota	5,02	4,97	4,96	5,07	5,08
7.	M. Maimun	5,28	5,45	5,44	5,40	5,39
8.	M. Polonia	8,80	9,04	9,13	9,41	9,43
9.	M. Baru	4,42	4,52	4,26	4,22	4,21
10.	M. Selayang	1,31	1,32	1,29	1,27	1,30
11.	M. Sunggal	3,11	3,10	3,03	3,01	3,02
12.	M. Helvetia	4,37	4,27	4,16	4,31	4,35
13.	M. Petisah	5,09	5,16	5,06	5,13	5,19
14.	M. Barat	20,96	20,73	21,84	20,95	20,99
15.	M. Timur	7,02	7,05	7,00	7,27	7,11
16.	M. Perjuangan	1,08	1,07	1,06	1,09	1,10
17.	M. Tembung	1,90	1,89	1,88	1,92	1,91
18.	M. Deli	13,49	13,39	13,34	13,35	13,36
19.	M. Labuhan	0,91	0,85	0,86	0,86	0,85
20.	M. Marelan	0,81	0,82	0,82	0,81	0,79
21.	M. Belawan	7,81	7,75	7,43	7,35	7,26
	Kota Medan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan

Menurut tabel 1, Kecamatan Medan Barat memiliki kontribusi PDRB kecamatan tertinggi terhadap PDRB Kota Medan dari tahun 2006-2010 dengan rata-rata 21,09%, diikuti oleh Kecamatan Medan Deli rata-rata sebesar 13,39% dan Medan Polonia rata-rata sebesar 9,16%. Sementara kontribusi PDRB kecamatan terendah terhadap PDRB Kota Medan dari tahun 2006-2010 adalah Kecamatan

Medan Marelان dengan rata-rata 0,81%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat disparitas atau ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota Medan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Todaro (dalam Sirojuzilam, 2008) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah atau regional. Tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ini juga ditentukan oleh lajunya pertumbuhan penduduk lebih dari PDRB, maka ini mengalami perubahan terhadap pendapatan perkapita, oleh sebab itu pertumbuhan PDRB tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena terdapat kemungkinan timbulnya keadaan tersebut maka pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi harus dibedakan (Sirojuzilam, 2008).

Disparitas merupakan kondisi perlu bagi percepatan pertumbuhan ekonomi pada awal pembangunan. Disparitas antara daerah di Indonesia yang didekati dengan disparitas pendapatan antar daerah (Indeks Williamson) yang mencerminkan disparitas pada tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah (Abipraja, 2002).

Williamson (1965) (dalam Kuncoro, 2004) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah.

Adapun faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah (Manik, 2009) yaitu :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
2. Perbedaan Kondisi Demografi
3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa
4. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah
5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini disajikan dengan bentuk analisis deskriptif kuantitatif.

3.2. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan dan dilaksanakan mulai Juni 2014.

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk menyamakan pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan batasan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Disparitas pembangunan ekonomi adalah ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi antar kecamatan di Kota Medan.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase perubahan PDRB tiap kecamatan dan perubahan PDRB Kota Medan tahun 2001-2010 atas dasar harga konstan.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita adalah nilai (PDRB) kecamatan atau Kota Medan dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing kecamatannya atau Kota Medan per tahun atas dasar harga konstan.
4. Jumlah penduduk adalah jumlah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili pada setiap kecamatan di Kota Medan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku literatur, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Medan, Pemerintah Kota Medan dan Bappeda Kota Medan. Data-data yang digunakan meliputi PDRB dan PDRB per kapita kecamatan, PDRB dan PDRB per kapita Kota Medan, jumlah penduduk kecamatan, jumlah penduduk Kota Medan, serta data-data lain yang mendukung. Dalam penelitian ini periode waktu pada data yang digunakan yaitu pada tahun 2001-2010.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menghitung beberapa hal yang terkait dengan tujuan penelitian, yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis *Klassen Typologi*, dan *Williamson Index*.

3.5.1. *Klassen Typologi*

Analisis *Klassen Typologi* adalah analisis yang digunakan untuk melihat pola pembangunan ekonomi tiap kecamatan di Kota Medan. Pada penelitian ini, tiap kecamatan akan diklasifikasikan menjadi empat golongan. Indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan tiap kecamatan yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita kecamatan.

Klassen Typologi membagi kecamatan-kecamatan menjadi empat klasifikasi yaitu (1) kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu kecamatan yang

memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata Kota Medan; (2) kecamatan yang maju tapi tertekan, yaitu kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Kota Medan; (3) kecamatan yang berkembang cepat, yaitu kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Kota Medan; (4) kecamatan yang relatif tertinggal yaitu kecamatan yang memiliki tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan rata-rata Kota Medan.

3.5.2. *Williamson Index* (V_w)

Indeks Ketimpangan *Williamson* merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kota Medan. Ketimpangan pembangunan ekonomi dapat dianalisis dengan rumusan sebagai berikut (Syafrizal, 1997):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2(f_i/n)}}{Y} \quad 0 < IW < 1$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB per kapita di kecamatan i
- Y = PDRB per kapita rata-rata Kota Medan
- f_i = Jumlah penduduk kecamatan i
- n = Jumlah penduduk Kota Medan

Hasil dari perhitungan *Indeks Williamson* adalah sebagai berikut : bila V_w mendekati angka satu maka menunjukkan ketimpangan semakin melebar dan bila V_w mendekati angka nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil antar kecamatan di Kota Medan.

3.5.3. Analisis Deskriptif

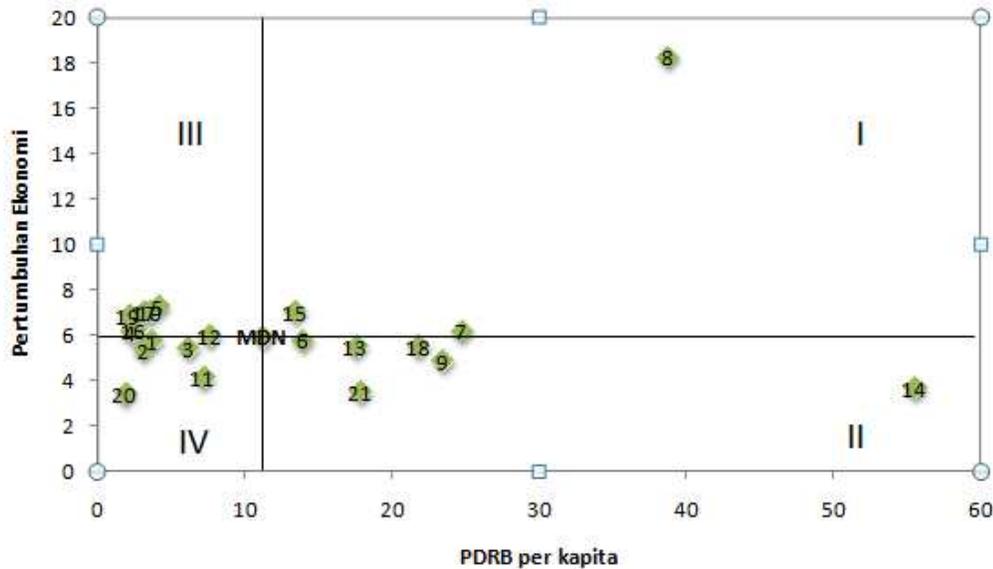
Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan ketiga pada rumusan masalah. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu daerah berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, diolah, mau pun yang sudah ada dalam penyajian informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian. Analisis ini dapat berupa gambaran perekonomian suatu daerah, potensi daerah, kondisi pemerintahan, strategi kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pola Pembangunan Ekonomi Tiap Kecamatan di Kota Medan

Analisis *Klassen Typologi* adalah alat analisis yang akan menunjukkan bagaimana pola dari pembangunan ekonomi pada tiap kecamatan di Kota Medan dan mengklasifikasikan tiap-tiap kecamatan ke dalam 4 kuadran. Dengan menentukan

rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal (sumbu Y) dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal (sumbu X). Periode pola pembangunan ekonomi pada tiap kecamatan dibagi menjadi 2, yaitu periode tahun 2001-2005 dan tahun 2006-2010. Sehingga diperoleh hasil dari *Klaseen Typologi* masing-masing periode seperti gambar berikut.



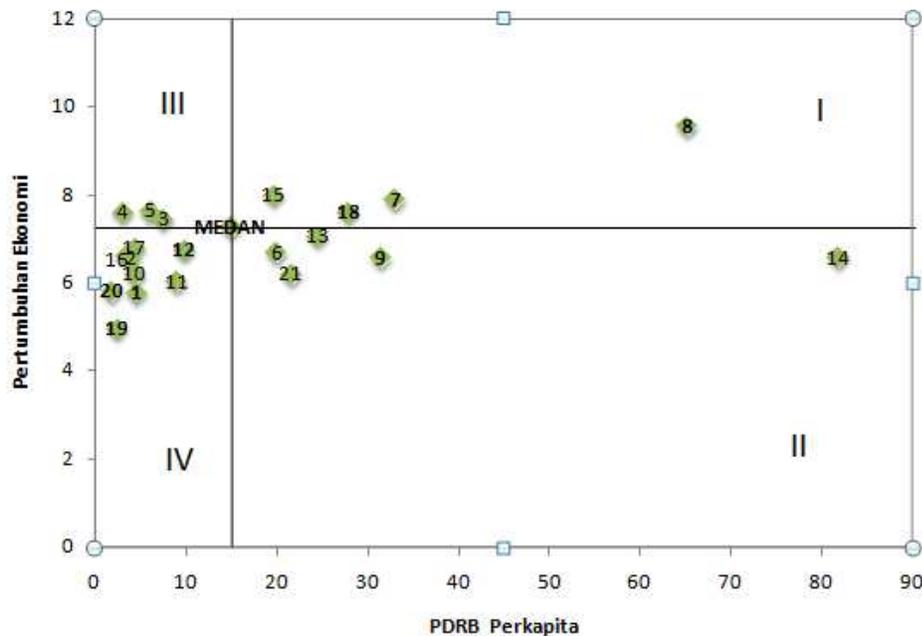
Keterangan :

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| 1 : Tuntungan | 8 : Polonia | 15 : Timur |
| 2 : Johor | 9 : Baru | 16 : Perjuangan |
| 3 : Amplas | 10 : Selayang | 17 : Tembung |
| 4 : Denai | 11 : Sunggal | 18 : Deli |
| 5 : Area | 12 : Helvetia | 19 : Labuhan |
| 6 : Kota | 13 : Petisah | 20 : Marelان |
| 7 : Maimun | 14 : Barat | 21 : Belawan |

Gambar 1
Pola Pembangunan Ekonomi Medan Tahun 2001-2005

Pada tahun 2001-2005, kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran I adalah Kecamatan Medan Medan Polonia, Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Maimun. Kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran II adalah Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Belawan, dan Kecamatan Medan Kota. Kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran III adalah Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Labuhan. Sedangkan untuk kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran IV adalah Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Sunggal, dan Kecamatan Medan Marelان.

Untuk pola pembangunan ekonomi periode tahun 2006-2010 dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut.



- Keterangan :
- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| 1 : Tuntungan | 8 : Polonia | 15 : Timur |
| 2 : Johor | 9 : Baru | 16 : Perjuangan |
| 3 : Amplas | 10 : Selayang | 17 : Tembung |
| 4 : Denai | 11 : Sunggal | 18 : Deli |
| 5 : Area | 12 : Helvetia | 19 : Labuhan |
| 6 : Kota | 13 : Petisah | 20 : Marelan |
| 7 : Maimun | 14 : Barat | 21 : Belawan |

Gambar 2
Pola Pembangunan Ekonomi Medan Tahun 2006-2010

Dari gambar 2, kecamatan yang termasuk kedalam kuadran I adalah Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Maimun. Untuk kuadran II, kecamatan yang termasuk di dalamnya adalah Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Barat. Pada kuadran III yang termasuk di dalamnya yaitu Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Amplas. Sedangkan yang termasuk ke dalam kuadran IV antara lain, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Helvetia.

Dari kedua hasil tersebut, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi perubahan pola pembangunan ekonomi kecamatan di Kota Medan. Kecamatan yang mengalami perubahan pola pembangunan ekonomi tersebut yaitu Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tembung, dan Kecamatan Medan Labuhan. Di antara kecamatan-kecamatan yang mengalami perubahan pola pembangunan ekonomi, hanya Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Amplas yang bergeser pada pola yang lebih baik. Pada periode tahun 2001-2005, Kecamatan Medan Deli berada di kuadran II dan pada periode tahun 2006-2010 bergeser ke kuadran I. Hal ini dapat diartikan Kecamatan Medan Deli mampu mengejar laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kota Medan, bahkan nilai kedua variabel dari kecamatan ini melebihi nilai kedua variabel Kota Medan. Pada Kecamatan Medan Amplas, periode tahun 2001-2005 berada pada kuadran IV, namun di periode tahun 2006-2010 bergeser ke kuadran III. Dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi di Kecamatan Amplas telah terjadi dan memberikan hasil pada laju pertumbuhan ekonominya yang lebih tinggi dibandingkan Kota Medan, sehingga dapat disimpulkan kecamatan ini mampu mengejar ketertinggalannya. Sedangkan pola pembangunan ekonomi Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tembung, dan Kecamatan Medan Labuhan justru mundur ke kuadran IV. Hal ini dapat diartikan bahwa kecamatan-kecamatan ini tidak mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya sehingga kecamatan-kecamatan tersebut justru tertinggal dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang mampu bertahan di kuadran III .

4.2. Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan

Untuk mengetahui ada tidaknya disparitas atau ketimpangan yang terjadi dan seberapa besar ketimpangan tersebut, maka dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan instrument analisis yaitu *Indeks Williamson*. Pada *Indeks Williamson*, variabel yang digunakan adalah pendapatan perkapita dan jumlah penduduk dari kecamatan-kecamatan dan Kota Medan dari tahun 2006 hingga 2010. Hasil perhitungan Indeks Williamson pada tiap kecamatan ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Indeks Williamson Tiap Kecamatan 2006-2010

No	Nama Kecamatan	IW				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Medan Tuntungan	0.133967	0.133675	0.134212	0.13398	0.155116
2	Medan Johor	0.18262	0.182501	0.182856	0.183275	0.196733
3	Medan Amplas	0.13589	0.136775	0.136981	0.135789	0.140554
4	Medan Denai	0.214628	0.212824	0.213204	0.212881	0.219053
5	Medan Area	0.156289	0.153279	0.152332	0.15211	0.140264
6	Medan Kota	0.013447	0.013585	0.012016	0.014363	0.028138
7	Medan Maimun	0.128119	0.098049	0.103614	0.103084	0.165695
8	Medan Polonia	0.396214	0.409615	0.413113	0.420618	0.383594
9	Medan Baru	0.100916	0.100509	0.101726	0.100535	0.103824
10	Medan Selayang	0.149909	0.150185	0.150081	0.149949	0.171841
11	Medan Sunggal	0.112324	0.112145	0.113606	0.115307	0.127771
12	Medan Helvetia	0.117652	0.118972	0.119593	0.119056	0.12904
13	Medan Petisah	0.055937	0.057927	0.057086	0.060965	0.062981
14	Medan Barat	0.654501	0.676778	0.675125	0.650957	0.643243
15	Medan Timur	0.010237	0.01852	0.017827	0.02182	0.013643
16	Medan Perjuangan	0.182949	0.182198	0.182569	0.181841	0.170204
17	Medan Tembung	0.196866	0.195944	0.1968	0.195758	0.192619
18	Medan Deli	0.153243	0.149929	0.150622	0.159714	0.094286
19	Medan Labuhan	0.19277	0.193968	0.194218	0.194005	0.201976
20	Medan Marelan	0.216373	0.21814	0.21868	0.218843	0.236394
21	Medan Belawan	0.043576	0.046756	0.041806	0.040692	0.02239

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan, diolah.

Pada tabel 2 dapat dilihat nilai nilai IW tertinggi ada pada kecamatan Medan Barat yang mana pada tahun 2006 sebesar 0.654 dan di tahun 2010 menjadi sebesar 0.643. Nilai IW dari Medan Barat menurun dari rentang tahun 2006-2010. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun ketimpangan di Kecamatan Medan Barat menurun. Hal yang sama juga terjadi pada Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Belawan dimana nilai IW kecamatan-kecamatan tersebut menurun. Sedangkan pada 14 kecamatan lainnya nilai IW tiap kecamatan meningkat dalam rentang tahun 2006 hingga 2010.

Tabel 3
Hasil Perhitungan Nilai Rata-Rata Indeks Williamson Antar Kecamatan dan Nilai Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	IW	Laju PE
2006	0.168973	6.821905
2007	0.169632	6.889048
2008	0.169908	6.626190
2009	0.169788	6.923333
2010	0.171398	7.186190
Rata-rata	0.16994	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan, diolah

Dari hasil perhitungan Indeks Williamson pada tabel 3, dapat dilihat nilai indeks Williamson menunjukkan peningkatan dengan nilai rata-rata ketimpangan periode 2006-2010 sebesar 0.16994. Nilai indeks Williamson pada tahun 2006 sebesar 0.168973 dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 0.171398. Nilai indeks tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi tergolong rendah ($IW < 1$) dengan rata-rata indeks sebesar 0.16994. Namun tidak menutup kemungkinan ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan akan terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata Indeks Williamson yang relatif naik.

4.3. Strategi dan Kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu titik fokus perencanaan di dalam aktivitas pembangunan regional dan perkembangannya sangat perlu diperhatikan terkait dengan kemajuan suatu daerah. Pembangunan ekonomi khususnya di Kota Medan dalam setiap kecamatan-kecamatanannya dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan dari tahun 2006-2010 mengalami peningkatan atau semakin timpang dan tidak menutup kemungkinan ketimpangan akan meningkat pada tahun berikutnya jika dilihat dari nilai indeks yang meningkat setiap tahunnya.

Strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah disparitas yaitu:

1. Menempatkan kesetaraan sebagai target kinerja para pelaksana pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur pemerataan.
2. Mengurangi kebijakan yang justru memperlebar ketimpangan.
3. Memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor dominan, yang unggul, atau pun yang sedang bertumbuh di setiap kecamatan.
4. Pemerataan alokasi sumberdaya, capital, infrastruktur dan teknologi pada tiap kecamatan.

5. Penyediaan akses dan kapasitas kepada masyarakat yang tidak mampu agar dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kota Medan sebagai pelaksanaan salah satu misinya yaitu “meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan”, menjabarkan strategi pembangunan ekonomi Kota Medan sebagai berikut:

1. Memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat pemerintahan dan fungsi-fungsi regional/nasional.
2. Meningkatkan kemampuan komparatif, kompetitif dan kooperatif daerah.
3. Mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih luas dan efisien dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan.
4. Mendorong percepatan pemindahan Bandara Polonia.
5. Meningkatkan kerjasama regional/internasional khususnya di bidang kebudayaan, pariwisata dan perdagangan.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama antar daerah.
7. Mengembangkan sistem informasi penanaman modal daerah berbasis elektronik dan pelayanan satu atap.
8. Menyusun kerangka kebijakan investasi.
9. Pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif investasi (green tax).
10. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan kawasan produksi lainnya.
11. Mengembangkan kemudahan, fasilitas dan insentif untuk tumbuh dan berkembangnya UMKMK.
12. Meningkatkan akses dan pelayanan kredit perbankan bagi usaha mikro (UMKMK).
13. Mendorong peningkatan akses dan pelayanan kredit perbankan bagi usaha mikro (UMKMK).
14. Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan UMKM.
15. Revitalisasi pasar tradisional-modern.
16. Mendorong pengintegrasian Program Bina Lingkungan BUMN.
17. Mendorong peningkatan taraf dan kualitas pendidikan serta diklat tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja domestik dan luar negeri.
18. Mendorong peningkatan jumlah wirausaha domestik.
19. Meningkatkan usaha ekonomi yang bersifat padat karya.
20. Meningkatkan kapasitas dan fungsi kelembagaan tenaga kerja.
21. Pembinaan kelembagaan dan permodalan UMKM.
22. Mendorong peningkatan pelayanan sektor perbankan dan keuangan.
23. Meningkatkan kualitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sektor dan kewilayahan.
24. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota.

25. Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual.
26. Meningkatkan kompetensi tenaga perencana.
27. Menyusun dan menetapkan kerangka regulasi daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
28. Penyelenggaraan siklus anggaran secara tepat waktu.
29. Pembinaan administrasi penatausahaan keuangan daerah.
30. Penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah secara tepat waktu.

Strategi pembangunan ekonomi Kota Medan tersebut akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan untuk misi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Penataan kawasan aktivitas ekonomi perkotaan.
2. Pengembangan ekonomi berbasis potensi dan sektor unggulan daerah.
3. Perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
4. Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah dan perbaikan kelembagaan ekonomi daerah.
5. Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik.
6. Peningkatan kerjasama ekonomi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus.
7. Peningkatan akses permodalan untuk mendukung kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah.
8. Peningkatan daya saing sektor industrial yang mampu menciptakan lapangan kerja masyarakat.
9. Perbaikan system kelembagaan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
10. Perbaikan regulasi dan kelembagaan sektor perbankan dan keuangan.
11. Peningkatan akses informasi dan pelayanan perijinan perbankan dan keuangan.
12. Meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
13. Mengembangkan badan kerjasama pembangunan kota dan kawasan strategis.
14. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat.
15. Mengembangkan e-planning yang terintegrasi.
16. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan efektif.
17. Meningkatkan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah.
18. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan kota.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pihak swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan potensi-potensi lain yang dimiliki. Pendistribusian teknologi yang merata, pengembangan kualitas sumber daya manusia baik itu pelaku ekonomi maupun tenaga perencana, penciptaan kawasan-kawasan aktivitas ekonomi di tiap kecamatan, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan merata untuk merangsang para investor menanamkan modalnya, pengembangan kualitas *skill* para pelaku-pelaku ekonomi

agar terus berinovasi dan meningkatkan daya saing. Sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, pemerataan pembangunan ekonomi dapat dirasakan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan tentang analisis disparitas pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota Medan, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis *Klassen Typologi* menunjukkan bahwa pada periode 2001-2005 dan 2006-2010 kecamatan yang tetap berada dalam kuadran I adalah Medan Polonia, Medan Timur, dan Medan Maimun. Kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran II yaitu Medan Barat, Medan Baru, Medan Belawan, Medan Kota, dan Medan Petisah. Kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran III adalah Medan Area, dan Medan Denai. Dan kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran IV antara lain Medan Johor, Medan Marelan, Medan Tuntungan, dan Medan Sunggal. Sedangkan kecamatan yang mengalami perubahan pola pembangunan selama periode-periode tersebut adalah Medan Amplas, Medan Selayang, Medan Helvetia, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Deli, dan Medan Labuhan.
2. Hasil analisis *Indeks Williamson* menunjukkan bahwa terdapat tujuh kecamatan dengan nilai IW yang menurun dan 14 kecamatan dengan nilai IW yang meningkat. Untuk nilai IW antar kecamatan, nilai IW tergolong rendah dengan rata-rata indeks sebesar 0.16994. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan akan terus meningkat. Hal ini dikarenakan nilai IW yang relatif naik.
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011-2015 sangat tepat sebagai strategi dan kebijakan dalam penyelesaian masalah ketimpangan pembangunan ekonomi, yakni dengan memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor dominan, unggul, atau yang sedang bertumbuh di setiap kecamatan, pemerataan alokasi sumberdaya, infrastruktur dan teknologi pada tiap kecamatan, penyediaan akses dan kapasitas kepada masyarakat yang tidak mampu agar dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi.

5.2. Saran

Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal untuk yang pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Pemerintah Kota Medan sebaiknya memberikan perhatian yang lebih pada pemerataan pembangunan ekonomi tiap kecamatan dengan adanya keseimbangan alokasi sumber daya, infrastruktur dan teknologi. Sehingga pembangunan ekonomi dapat dirasakan di tiap-tiap kecamatan.

2. Pemerintah Kota Medan sebaiknya memperbaiki kinerja dan manajerialnya kelembagaannya agar pelaksanaan atau pengimplementasian dari rencana pembangunan ekonomi berjalan secara terintegrasi.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada pola pembangunan ekonomi, tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi dan strategi dalam penyelesaian ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota Medan pada periode tahun 2006-2010. Maka penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti topik yang sama dengan tahun yang terbaru untuk melihat dan membandingkan apakah ketimpangan ekonomi antar kecamatan di tahun berikutnya akan meningkat atau menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, Soedjono, 2002. *Perencanaan pembangunan di Indonesia : konsep, model, kebijaksanaan, instrumen serta strategi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Adisasmita, R, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, 2010. *PDRB Kota Medan Perkecamatan tahun 2009*, BPS Kota Medan, Medan.
- _____, 2011. *Kota Medan Dalam Angka 2006-2011*, BPS Kota Medan, Medan.
- _____, 2011. *Kecamatan Medan (21 Kecamatan) Dalam Angka 2010*, BPS Kota Medan, Medan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, 2011. *Analisis Struktur Ekonomi Penduduk Kota Medan Tahun 2006-2010*, BPS Kota Medan, Medan.
- Caska dan R.M, Riadi, 2008. “*Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Riau*”, *Jurnal Industri dan Perkotaan* Volume 12 Nomor 21, hal 1629.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1987. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Jauhariyah, Nur Anim dkk, 2012. “*Disparitas Antar Kecamatan dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi*”, *CBAM FE Unisulla*, Volume 1 Nomor 2, hal 757-772.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Manik, Fitri R, 2009, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kota Medan dengan Kabupaten Simalungun*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nehen, I Ketut, 2010. *Perekonomian Indonesia*. Diktat Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Rumagit, Irene dkk, 2014. “*Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*”, *e-Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Volume 4 Nomor 1.
- Sirojuzilam, 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Sjafrizal, 1997. “*Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*”, *Prisma LP3ES*, No.12 hal 15-24.
- Sutarno, dan Mudrajad Kuncoro, 2003. “*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 8 Nomor 2, hal 97 – 110.
- Tambunan, Tulus, 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 1999. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C, 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.

Yusmawita, Fitri, 2011. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Zebua, Yakin Rahmat, 2010. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.

Website:

Indonesia Setara. 2014. *Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan (bag.III)*. <http://indonesiasetara.org/mengurangi-ketimpangan-meluruskan-esensi-pembangunan-bag-iii.html> (27 Agustus 2014).

www.bappenas.go.id

www.pemkomedan.go.id